

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adwar Adhyatma, analisis mengenai penangkapan dan penahanan dalam prakteknya, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 15.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Keenam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 119.

Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 67.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 29.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm 71.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet. Ketiga, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 98-99.

Moh. Kusnardi dan Harmali Ibrahim, Hukum Tata Negara, Pengertian Konstitusi, hlm 64.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, Cet.11, hlm. 22.

I Dewa Gede Atmadja, Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum, Setara Press, hlm. 21.

Zulkarnaen & Beni Ahmad Saebani, Hukum Konstitusi, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 137.

Achmad Ali, Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume 1 Pemahaman Awal Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009, hlm 288.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

C.S.T., Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jilid I, cet. 9, Jakarta: Balai Pustaka, 1992, hlm. 18.

Mohammad Tahir Azhary, Negara Hukum-Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cetakan Pertama, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 50, dalam Zainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman, Yogyakarta: Imperium, 2013, hlm. 31.

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Cetakan 1, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 1.

Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Tentang Unsur-Unsurnya, Cetakan Pertama, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1995, hlm. 39.

Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Cetakan keenam, Nusa Media: Bandung. 2011, hlm. 179.

Maria Farida Indarti S. Ilmu Perundang-Undangan jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius: Yogyakarta. 2007, hlm. 44.

Moh. Maftudz MD. Membangun Politik Hukum. Menegakkan Konstitusi. Cetakan ketiga, Rajawali Pers Persada: Jakarta. 2012, hlm. 53.

Dahlan Thaib. Pancasila Yuridis Ketatanegaraan. Yogyakarta: AMP YKPN. 1994, hlm. 71.

Bernard L. Tanya. et. al. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cetakan IV. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 94.

Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab. Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008, hlm. 126.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

_____. Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

_____. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia.

_____. Ketetapan MPR No. III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

_____. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

_____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

_____. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 24 Ayat (1) dan (2).

_____. Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 24C ayat (1) sampai (6).

Putusan Pengadilan

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013.

Indonesia. Putusan Pengadilan, Nomor 63 PK/Pid/2012.

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor Perkara 5/Pid.Prap/2015/PN Kis, tentang Praperadilan antara Welly Hutasoit Lawan Kepolisian Republik Indonesia.

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor Perkara 04/Pid.Pra/2014/PN.Lwk, tentang Praperadilan antara Wahyudi M. Su'udi melawan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dkk.

Internet

Berita prima, "Penangkapan Bambang Widjojanto Dilakukan Tanpa Pemberitahuan" [berita], 23 januari 2015.